

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan kemandirian suatu bangsa dan negara sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh negara tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat dihasilkan dari proses dan sistem pendidikan yang ada. Semakin baik sistem pendidikan maka akan semakin baiklah kualitas SDM yang dimiliki suatu negara. Sehingga mampu menciptakan kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta budaya.

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan maupun orang tua sangat berharap agar murid dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan masa depan. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, setiap lembaga pendidikan hendaknya selalu berupaya agar lembaga pendidikan yang dikelolanya dapat menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu produk yang dapat memuaskan para pelanggan.

Peningkatan Mutu Pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan juga merupakan hal yang harus terus diperjuangkan oleh lembaga pendidikan dalam rangka menjalankan amanah undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana dikatakan sormin (2017) bahwa “Sekolah merupakan

lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai *agen of change* (agen perubahan) yang bertugas untuk membangun peserta didik agar sanggup memecahkan masalah nasional (internal) dan memenangkan persaingan internasional (eksternal)”.

Sebagai wadahnya kaum intelektual, sekolah dituntut mampu menciptakan generasi-generasi penerus yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dalam menyikapi tuntutan perkembangan zaman. Hal-hal tersebut dapat terwujud dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi warga sekolah dalam menjalankan proses Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sekolah pada hakikatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sekolah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya melalui proses pendidikan. Untuk itu sekolah dituntut mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu secara berkesinambungan dan terus meningkat mengikuti tuntutan zaman.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi (Permen Dikbud 34 tahun 2018) harus ditunjang oleh banyak pendukung. Diantaranya adalah kepala sekolah dan guru professional sebagai salah satu input sekolah yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh pada berlangsungnya proses pendidikan. Oleh karenanya, diperlukan kepala sekolah

yang professional, sebagai pemenuhan sumber daya manusia yang baik dan memiliki kompetensi yang mendukung tugas serta fungsinya dalam menjalankan proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Sebagai pimpinan lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut mampu merumuskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan orientasi sekolah dalam menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien. Kepemimpinan pendidikan yang efektif memberikan dasar dan menempatkan tujuan pada posisi penting untuk merubah norma-norma dalam program pembelajaran, meningkatkan produktifitas, dan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang kreatif dan inovatif untuk mencapai hasil yang maksimal dan berujung pada peningkatan mutu pendidikan sekolah. Disamping itu, Peranan kepala sekolah dalam menentukan operasional kerja harian, bulanan, semesteran, dan tahunan sangat penting bagi pemecahan berbagai problematika pendidikan di sekolah. Hal ini dilakukan sebagai komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan supervisi pengajaran, konsultasi, dan perbaikan-perbaikan penting guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan berujung pada peningkatan mutu Pendidikan sekolah yang dipimpinnya. Sagala (2013:145) mengatakan bahwa:

Kepemimpinan adalah suatu pokok dari keinginan manusia yang besar untuk menggerakkan potensi organisasi, kepemimpinan juga salah satu penjelas yang paling populer untuk keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi. Kepemimpinan yang kuat dan tangguh serta memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan program organisasi amat diperlukan dalam suatu organisasi.

Hal ini menegaskan bahwa Kepemimpinan diperlukan untuk memberdayakan sumber daya organisasi secara strategik dengan penuh kreativitas, inovasi, motivasi, dan berorientasi pada peningkatan sumber daya dalam jangka panjang.

Tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan sangat rumit dan berat karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya material (sarana dan prasarana) pendidikan dan termasuk elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian program-program pemberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, penguasaan terhadap manajemen sangat dibutuhkan oleh setiap pengelola pendidikan.

Kepemimpinan dan manajemen memiliki kemiripan tetapi tidak sama. Terdapat kemiripan karena keduanya memiliki sasaran atau objek yang sama yakni menggerakkan organisasi dengan segala organ yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keduanya tidak sama karena kepemimpinan berkaitan erat dengan visi, nilai-nilai, dan kultur. Zamroni (2014:44) menuturkan “Kepemimpinan merupakan suatu keyakinan dan prilaku pemimpin untuk menanamkan kepada seluruh komponen organisasi akan visi, nilai-nilai, dan kultur dikalangan warga”.

Pemberdayaan komponen atau elemen masyarakat harus dilakukan dengan memfasilitasi dan memberdayakan warga masyarakat sebagai wujud komitmen pimpinan sekolah terhadap pengembangan sekolah berbasis masyarakat. Kepala sekolah sebagai manager harus berupaya mencari dan mengelola dukungan dari

masyarakat baik berupa dukungan dana, pemikiran, moral dan tenaga, dan sebagainya yang sangat bermanfaat bagi pengembangan sekolah.

Demokratisasi kehidupan masyarakat Indonesia memberikan otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menggulirkan kebijakan otonomi, termasuk otonomi pendidikan yang diperjelas melalui PP nomor 66 tahun 2010. Ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Pendidikan sekolah tidak saja dalam aspek manajemennya, lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Kesempatan masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan, mendukung serta membangun pendidikan memiliki wadah yang dinamakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Komite Sekolah terbentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 yang pada pasal 1 (satu) yang menyatakan bahwa “Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan”.

Komite sekolah memiliki fungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan melaksanakan tugas sebagai mana termaktub dalam pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
- b. menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Melalui peran dan fungsi yang telah diberikan oleh pemerintah, masyarakat melalui komite sekolah memiliki legitimasi dalam memberikan bantuan, dorongan, perhatian, dan pengawasan terhadap proses pendidikan sekolah anak-anaknya. Hal ini tampaknya kurang dipahami oleh masyarakat. Masih banyak ditemui masyarakat hanya menitipkan anaknya pada sekolah dan tidak mau tahu perkembangan pendidikan anaknya. Ketika menemukan keburukan anak maka orangtua maupun masyarakat menyalahkan sekolah, padahal masyarakat secara tidak langsung juga bertanggungjawab atas *output* yang dihasilkan oleh sekolah.

Dalam realitas yang terjadi di masyarakat masih banyak ditemui komite sekolah yang tidak mengetahui tugas, peran dan fungsinya bahkan wewenangnya sebagai komite sekolah. Komite sekolah lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan keuangan (pengutipan bantuan dana di masyarakat) dan

cenderung mengabaikan peran dan fungsi lain yang seharusnya juga dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan tugasnya dalam pengawasan terhadap program pendidikan yang berjalan di sekolah. sehingga sumbangan ide-ide, pemikiran, dan gagasan yang inovatif sangat minim. Komite sekolah juga kerap kali hanya dijadikan formalitas dan pembentukan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kontribusi dan partisipasi orang tua/masyarakat rata-rata masih bersifat umum, yaitu pada dukungan dana, bukan pada proses Pendidikan (pengambilan keputusan, evaluasi, monitoring, dan pertanggungjawaban). Serta banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga keberadaan komite sekolah tidak menghasilkan program-program yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan sekolah.

Keadaan di atas dapat disebabkan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan oleh sekolah dalam hal ini kepala sekolah. Kepala sekolah yang tidak mampu memancing dan memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat masuk dalam ranah proses pendidikan di sekolah. Dengan kepemimpinan kepala sekolah yang strategis seharusnya mampu menarik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah melalui program-program yang dikreasikan dan dilaksanakan bersama-sama antara masyarakat dengan sekolah. Untuk itu, sekarang sangat diperlukan sinergitas antara pihak sekolah dan masyarakat dalam menghasilkan kualitas pendidikan yang baik bagi peningkatan mutu pendidikan sekolah. Untuk mendukung itu diperlukan kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menghimpun partisipasi masyarakat secara aktif, membangun relasi, melibatkan masyarakat dalam memberikan

pertimbangan kebijakan yang dijalankan oleh sekolah, dan menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dengan sinergitas yang kuat bersama masyarakat.

Kontribusi dalam KBBI diartikan sebagai uang iuran (kepada perkumpulan dsb) atau sumbangan. Amelia Iis Susanti (2015) menyimpulkan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.

Secara geografis, SMK Negeri 1 Panai Hulu merupakan satu satunya sekolah SMK yang berstatus Negeri dikecamatan Panai Hulu kabupaten Labuhanbatu, provinsi Sumatera Utara. Dalam pengamatan awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak sekolah, dapat dipaparkan secara singkat bahwa SMKN 1 Panai Hulu sudah berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki komite sekolah sebanyak 8 orang namun belum menjalankan perannya secara optimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan latar belakang pendidikan dari komite sekolah yang masih dapat dikatakan rendah, kepala sekolah tidak berdomisili di daerah sekolah membuat beberapa kegiatan manajemen sekolah diserahkan kepada wakil kepala sekolah. Akreditasi sekolah pada tahun 2018 adalah B dengan nilai akhir 83 (delapan puluh tiga).

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas. Maka penulis tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panai Hulu”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Komite sekolah SMKN 1 Panai Hulu belum menjalankan perannya dengan maksimal.
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah SMKN 1 Panai Hulu belum berjalan secara maksimal.
3. Mutu Pendidikan SMKN 1 Panai Hulu masih perlu ditingkatkan.

1.3. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekolah yang menjadi objek penelitian adalah SMK Negeri 1 Panai Hulu yang beralamat di Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
- 2) Kontribusi Komite Sekolah yang menjadi subjek penelitian adalah 4 tugas komite sekolah sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah yang ada pada SMK Negeri 1 Panai Hulu yaitu meliputi memberi pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi.
- 3) Mutu Pendidikan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap sekolah yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia

1.4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat kontribusi sekolah terhadap mutu pendidikan di SMK N 1 Panai Hulu?
- 2) Apakah terdapat kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SMK N 1 Panai Hulu?
- 3) Apakah kontribusi komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SMK N 1 Panai Hulu?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

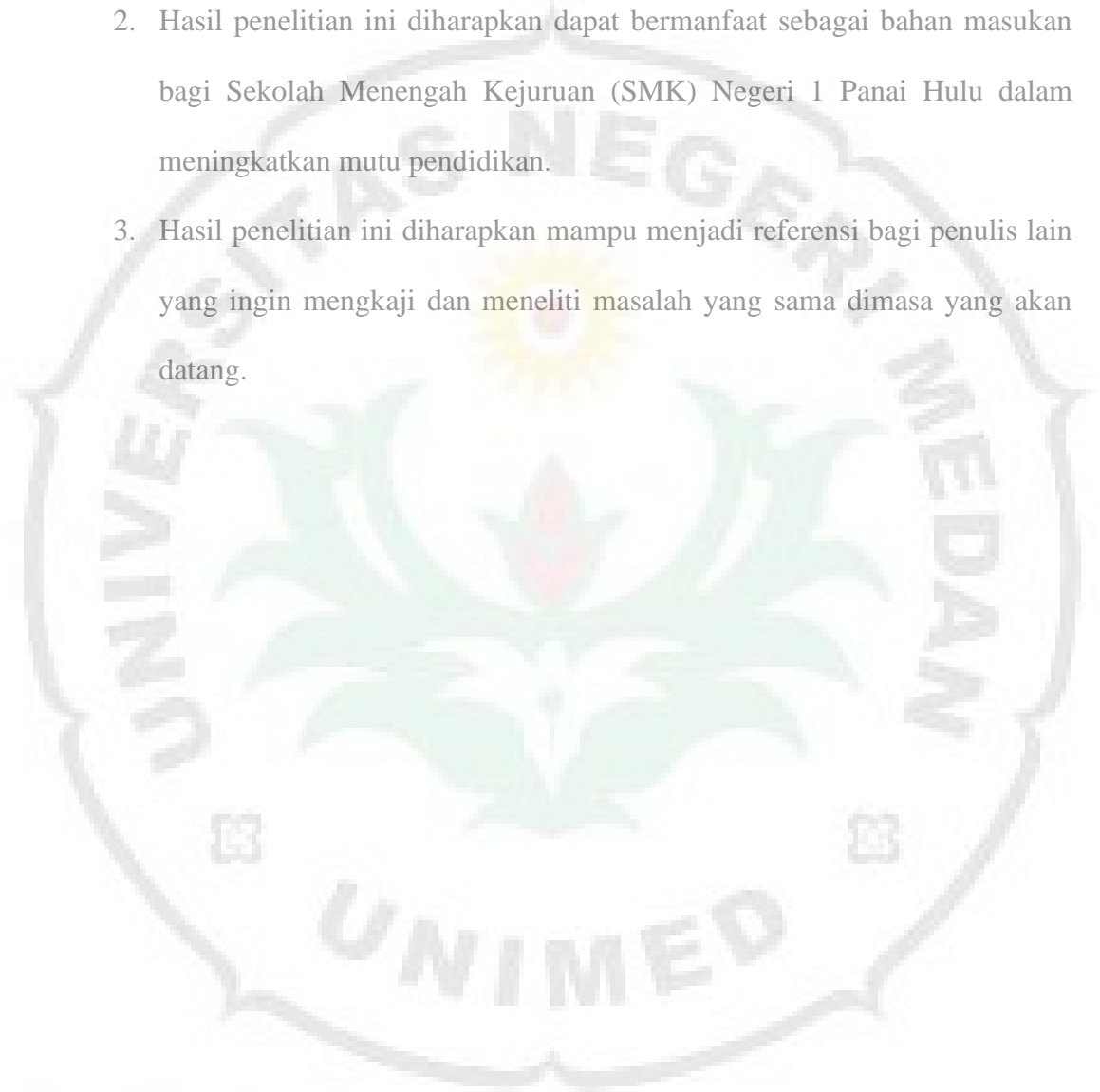
1. Untuk mengetahui kontribusi komite sekolah terhadap mutu pendidikan SMK N 1 Panai Hulu
2. Untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu Pendidikan SMK N 1 Panai Hulu
3. Untuk mengetahui kontribusi komite sekolah dan kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu Pendidikan SMK N 1 Panai Hulu

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan menjadi output penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah dan mutu pendidikan di SMKN 1 Panai Hulu.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panai Hulu dalam meningkatkan mutu pendidikan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis lain yang ingin mengkaji dan meneliti masalah yang sama dimasa yang akan datang.



THE
Character Building
UNIVERSITY